

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saya katakan kepada anda bahwa perang dunia ketiga sudah dimulai. Inilah perang yang meluluhlantakkan Brazil, Amerika Latin dan praktis semua kawasan dunia ketiga. Bukan tentara yang tewas, tapi kanak-kanak. Bukan penghancuran jembatan yang terjadi, tetapi pabrik pabrik, rumah sakit dan keseluruhan perekonomian. Inilah perang terhadap hutang luar negeri, perang yang dijalankan dengan senjata utamanya : **Bunga Uang !**

Lula Da Silva,  
Pemimpin Partai Buruh Brazil

Hutang luar negeri adalah sebuah persoalan yang sangat kompleks, bukan hanya persoalan statistik dan teknis semata serta sumber persoalan hutang luar negeri ini tidak dapat disandarkan pada negara-negara penghutangnya. Akan tetapi persoalan ini bersangkutan dengan sistem ekonomi politik internasional. Sejarah krisis hutang negara-negara sedang berkembang menunjukkan beberapa hal penting mengenai struktur finansial internasional, dan menimbulkan pertanyaan penting mengenai seberapa stabil struktur finansial, yang berfungsi paling penting dalam Ekonomi Politik Internasional

Pada awalnya hutang luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang adalah sebagai modal untuk melakukan pembangunan dan memperbaiki perekonomian yang sedang mengalami krisis. Banyak sekali data data yang menyebutkan bahwa sebagian besar negara-negara sedang berkembang yang terjebak hutang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Pembayaran kembali hutang luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara penghutang telah banyak menguras habis sumber dayanya.

Pada tahun 1982 Meksiko menyatakan dirinya pailit dan tidak mampu membayar hutang hutangnya, kemudian krisis ini menjalar ke daratan Amerika Latin lainnya, seperti Brazil.<sup>1</sup> Selanjutnya IMF datang memberikan bantuan dan 'resep penyehatan'. Walaupun pada saat itu Meksiko dapat keluar dari krisis, namun tujuh tahun setelah itu Meksiko, Brazil dan negara-negara penghutang yang lain melonjak hutang hutangnya dari US\$ 831 milyar menjadi sekitar US\$ 1.300 milyar.<sup>2</sup> Bermula dari krisis tersebut muncullah berbagai macam persoalan, diantaranya kemiskinan, penutupan perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang diikuti dengan PHK secara massal maupun kerusuhan sosial, sebagai akibat dari program penghematan yang didukung oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

Lima belas tahun setelah krisis hutang pertama kali terjadi, tepatnya tahun 1997 di Asia Timur muncul kembali krisis yaitu krisis moneter. Tak berbeda jauh dengan krisis hutang yang terjadi pada tahun 1982, krisis tahun 1997 di Asia Timur salah satu faktor penyebabnya adalah hutang luar negeri yang menumpuk,

---

<sup>1</sup> Ivan A Hadar, *Utang, Kemiskinan dan Globalisasi*, Lapera Pustaka Utama, Yog

namun penyebab utamanya adalah ketidaksejajaran nilai mata uang.<sup>3</sup> Dimulai dari Thailand krisis berkembang ke Malaysia, Indonesia, Filipina, Korea Selatan dan bahkan Rusia. Akibat dari krisis itu negara yang terkena krisis meminta bantuan IMF untuk memulihkan perekonomiannya. Sama seperti yang terjadi pada krisis hutang terdahulu, IMF menganjurkan 'Terapi Meksiko' yang pernah gagal. Namun negara negara yang membutuhkan bantuan dari IMF maupun lembaga donor yang lain tidak bisa berbuat banyak, seolah olah tidak ada pilihan lain selain menerapkan program program Neo-Liberal tersebut.

Sebenarnya telah banyak upaya dilakukan untuk menangani masalah hutang negara sedang berkembang, tetapi situasi prisoners dilemma<sup>4</sup> yang meliputi hutang negara sedang berkembang baru bisa dipecahkan akhir dasawarsa 1980-an ketika muncul Rencana Brady<sup>5</sup>. Inti pokok Usulan brady adalah bahwa negara-negara penghutang yang setuju mentaati peraturan ketat IMF dan Bank Dunia akan diberi bantuan keringanan hutang hingga 20 %. Konsep ini pernah menjadi gagasan yang begitu mengemuka di negara Meksiko tatkala Meksiko menghadapi krisis hutang. Rencana Brady ini rinciannya rumit, tetapi konsepnya sederhana. Pemerintah AS melakukan intervensi ke dalam negosiasi dan menawarkan diri untuk membiayai pembayaran hutang luar negeri Meksiko asalkan semua pemberi pinjaman mau melakukan tindakan-tindakan khusus untuk peringanan hutang, termasuk penurunan tingkat bunga, penjadwalan kembali pembayaran hutang, dan berbagai macam tindakan yang meringankan debitur. Berdasar Rencana Brady ini, bank-bank swasta menukarkan hutang Meksiko dengan obligasi pemerintah AS

<sup>3</sup> lihat George Soros, *Krisis Kapitalisme Global*, Penerbit Qalam, 2002, hal. 170

<sup>4</sup> situasi yang menggambarkan terkungkungnya sebuah negara karena jebakan hutang

(disebut "Brady Bonds") dengan nilai lebih rendah, yang didukung oleh kewajiban pembayaran oleh Meksiko. Meksiko membayar kepada pemerintah AS, yang kemudian membayar kepada para kreditor. Dalam skema ini, Meksiko beruntung karena mendapat keringanan hutang, bank-bank beruntung karena bisa mengurangi risiko kebangkrutan, dan pemerintah AS bisa menghindari kemungkinan ketidakstabilan finansial.

Pemerintah AS menggunakan kekuasaan negara untuk mendobrak kemacetan (akibat situasi "prisoners' dilemma") yang bisa merusak. Pemerintah mampu merubah situasi permainan, dengan mengancam akan memberi kerugian besar kepada yang tidak mau bekerjasama. Tiba-tiba saja semua pihak menjadi berkepentingan untuk mendukung peringanan hutang itu. Hasil seperti itu hanya bisa dicapai oleh negara yang bertindak atas nama kepentingan kolektif bank-bank kreditor dan negara-negara debitur.

Rencana Brady berhasil mengatasi kemacetan akibat "prisoners' dilemmma" dalam kasus Meksiko (walaupun tidak bisa mencegah masalah neraca pembayaran yang dialami Meksiko sesudah itu), dan telah diterapkan pada banyak negara debitur NSB lainnya. Dengan berkurangnya beban hutang yang semula tak mungkin terbayar, banyak dari negara-negara ini bisa kembali mengejar keberhasilan ekonomi dan stabilitas politik. Dalam rencana Brady, Bank Dunia dan IMF akan bertindak sebagai polisinya bank-bank swasta Barat yang setuju menyediakan sejumlah dana minimal untuk bantuan peringanan hutang hanya kepada negara-negara penghutang yang memang selalu patuh pada peraturan-

Program program yang disyaratkan oleh Bank Dunia dan IMF tersebut sama sekali tidak berbeda dengan yang diterapkan di negara negara industri maju pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu, akhir tahun 1970-an negara-negara industri maju yang mengadopsi sistem ekonomi *keynesian*<sup>6</sup> sedang mengalami krisis. Gagasan *keynesian* (atau sering juga disebut *welfare state*) harus dirombak karena bagi segolongan teoritis sistem *keynesian* adalah sebuah sistem yang boros dan tidak efektif. Krisis finansial harus diatasi, satu-satunya cara adalah membongkar gagasan dasar *keynesian* yang dianggap sebagai biang penyebab krisis. Intervensi pemerintah harus ditekan sampai serendah mungkin dalam kegiatan ekonomi adalah “nasehat bijak” yang merupakan harga yang tidak bisa di tawar-tawar lagi. Jika negara terlalu banyak mencampuri urusan ekonomi dengan serangkaian program dan kebijakannya, dikhawatirkan akan membuat roda ekonomi menjadi tidak efektif, karena pasar telah didekte dan dimandulkan oleh pemerintah sendiri.

Disisi lain, campur tangan negara yang terlalu banyak bisa mengakibatkan anggaran pemerintah menjadi defisit, dikarenakan terlalu banyak melakukan program “pemborosan” seperti; program subsidi, proteksi, alokasi dana kesejahteraan. Kebijakan lain yang merugikan semisal, program kenaikan pajak karena akan berdampak pada sektor investasi yaitu minimnya orang melakukan kegiatan usaha, sehingga roda ekonomi, lapangan kerja serta income pemerintah akan banyak berkurang. Resep baru yang kesemuanya tentang neo liberalisme ini bernama Washington Consensus.

---

<sup>6</sup> Model Sistem ekonomi yang di ilhami gagasan Seorang Ekonom Inggris Jhon

Keruntuhan sistem *welfare-state* sebenarnya sudah mulai terbaca semenjak terjadi krisis di paruh akhir 70-an, ketika negara-negara utama mulai mengalami krisis keuangan. Akhirnya ketika Margaret Thatcher dan Ronald Reagan berkuasa mereka merubah semua kebijakan yang ada di negara mereka masing-masing ke arah neo-liberalisme. Kedua pemimpin ini sering diistilahkan dengan Thatcherisme dan Reaganisme.<sup>7</sup>

Sesungguhnya IMF, WB bersama-sama dengan WTO adalah tiga agen penting dalam sistem ekonomi yang menopang Neo-Liberalisme. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas IMF adalah menstabilkan neraca pembayaran sebuah negara yang sedang terkena dengan masalah keuangan, WB, yang dahulunya berdiri dengan nama IBRD lewat perjanjian yang sama dengan IMF yaitu perjanjian *Bretton Woods* paska perang Dunia II, berfungsi sebagai pemberi pinjaman pembangunan pada negara yang kesusahan dana segar untuk program pembangunan.<sup>8</sup>

Melalui lembaga lembaga keuangan internasional tersebut negara-negara sedang berkembang terutama di negara-negara Asia, diarahkan untuk menerapkan aturan-aturan yang tercantum dalam *Washington Consensus*. Pintu masuk agar aturan-aturan tersebut diterapkan ialah ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Pada saat itu banyak negara-negara Asia mengalami keguncangan dalam sistem moneternya, terutama dalam neraca pembayaran dan transaksi berjalan. Untuk memulihkan kondisi ekonomi yang parah tersebut negara negara yang

<sup>7</sup> Lihat tulisannya I.Wibowo, "Globalisasi, Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi", *Kompas*, 3 Mei 2002.

mengalami krisis ini meminta bantuan kepada lembaga-lembaga keuangan, seperti IMF maupun negara negara donor.<sup>9</sup>

Sistem ekonomi politik Neo-Liberalisme tidak akan berhasil menjadi sistem internasional jika hanya diterapkan di beberapa negara saja (negara negara industri maju). Negara-negara sedang berkembang yang lainpun harus juga menerapkan sistem tersebut. Mengingat banyak negara negara sedang berkembang yang terkesan resisten terhadap sistem tersebut maka harus dilakukan semacam 'paksaan' agar sistem tersebut diterapkan secara penuh oleh semua negara. Syarat tersebut kita kenal dengan sebutan program program penyesuaian struktural (*Struktural Adjustmen Program*) yang dituangkan secara rigid dalam bentuk *Letter of Intens (LoI)*. Inti dari syarat-syarat tersebut ialah menyesuaikan kebijakan perekonomian negara yang bersangkutan agar lebih berorientasi dan terintegrasi ke dalam sistem pasar dunia. Artinya menyesuaikan diri dengan kehendak sistem pasar dunia yang dominan, yaitu sistem perdagangan dunia yang bebas seperti yang berlaku di negara negara industri maju di Amerika Utara, Eropa dan Jepang. Mau tidak mau negara-negara sedang berkembang yang ingin mendapatkan bantuan harus melaksanakan sejumlah 'langkah penyesuaian' di dalam negeri.

Untuk kasus di Indonesia, pasca kegagalan developmentalisme di akhir 1970, Lewat Industrialisasi Substitusi Impor (ISI), integrasi sistem ekonomi Indonesia kedalam tatanan global semakin terlihat jelas dalam sektor finansial. Sejauh ini integrasi tersebut mendapat respon positif dari berbagai pelaku ekonomi terbukti dengan masuknya arus modal asing dalam jumlah yang sangat besar. Pada tahun 1988 Indonesia membuat sebuah kebijakan

“bersejarah” dalam sektor finansial, yaitu di keluarkannya Paket Oktober 1988 (pakto 88) tentang liberalisasi keuangan, salah satu isinya mengenai kebebasan dalam sektor perbankan.<sup>10</sup>

Akibat berbagai macam deregulasi yang di keluarkan oleh pemerintah, ternyata aliran kapital yang masuk, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan Indonesia sempat tercatat sebagai salah satu negara di Asia yang menorehkan angka pertumbuhan ekonomi sangat mengagumkan. Untuk sementara, tidak ada kekuatan atau elit politik tertentu yang menentang cara ini. Sampai pada tahun 1990-an pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. tetapi keadaan ini terbalik 180 derajat ketika negeri ini mengalami krisis ekonomi dan politik pada akhir 1997. Pada waktu itu nyaris seluruh bangsa di Asia mengalami krisis, bermula dari krisis mata uang Bath di Thailand akhirnya menciptakan *efek domino* di kawasan Asia lainnya. Angka pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang di capai selama ini seperti raib menguap entah kemana. Bangunan ekonomi bangsa ini ambruk begitu saja seolah-olah tak berbekas.

Krisis ekonomi dan politik yang terjadi pada penghujung tahun 1997 ingin memberikan gambaran berbeda. yaitu, menunjukkan bahwa bangunan ekonomi dan politik negeri ini tidaklah sekokoh yang dibayangkan banyak orang. Pembangunan yang dilakukan selama 30 tahun lebih, ternyata hanya di terjang sekali krisis sampai hari ini tidak kunjung pulih. Tetapi, disisi lain krisis ini memberikan dampak yang begitu luas pada psikologi sosial masyarakat Indonesia. Karena krisis tersebutlah akhirnya melahirkan gerakan massa yang begitu besar

gerakan Mei 1998. Yaitu, berujung dengan jatuhnya rezim otoriter Jendral (pur) Soeharto dari tampuk kekuasaannya.

Berakhirnya orde baru memberikan banyak harapan pada semua orang, bahwa krisis yang ada secepatnya bisa diselesaikan, mengingat krisis yang terjadi sangat parah dan berubah menjadi krisis multi dimensi. Orde baru telah dianggap sebagai penyebab dari krisis dan Orde Barulah yang membawa Indonesia terperangkap ke dalam sebuah tatanan ekonomi global yang tidak berpihak pada negara-negara lemah.

Selanjutnya, seperti halnya di negara-negara asia lainnya pasca krisis, meski kehadiran IMF sempat mengundang polemik, setelah berbagai macam usulan dari pemerintah ditolak, seperti usulan untuk membentuk Dewan Mata Uang (Currency Board System / CBS), akhirnya pemerintah Indonesia meminta bantuan IMF untuk memulihkan perekonomiannya. Di masa inilah resep resep penyembuhan dari IMF dan program-program Neo-Liberal harus diterapkan oleh Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan diatas akhirnya muncul rumusan masalah sebagai berikut:

*"Bagaimana proses transformasi menuju ekonomi politik Neo-Liberal di*

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa negara negara sedang berkembang dipaksa untuk melakukan transformasi ekonomi politiknya ke arah Neo-Liberalisme melalui hutang luar negeri.
2. Neo-Liberalisme yang selalu didengungkan oleh negara-negara industri maju tidak cocok diterapkan di negara negara sedang berkembang, malahan akan semakin memperparah perekonomiannya.

### **D. Kerangka dasar Teori**

#### **Konsep Neo-Liberalisme**

Berangkat dari uraian diatas, kerangka dasar teoritik yang akan dipergunakan untuk menajalaskan permasalahan tersebut adalah konsep tentang Neo-Liberalisme

Neo-Liberalisme didasarkan pada filsafat liberalisme klasik Adam Smith. Perspektif liberal ini menekankan sisi kooperatif dari sifat manusia, yang cenderung hanya memperhatikan segi buruk dan kesewenang-wenangan negara. Bahkan bisa dikatakan bahwa liberalisme merupakan aliran berpikir yang anti-negara. Kaum liberal klasik mencela negara yang cenderung menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang dan memperjuangkan reformasi untuk melemahkan kekuasaan negara yang terpusat dan menggalakkan kebebasan individual; yaitu mendorong munculnya sistem pemerintahan yang demokratis. Dua gagasan pokok liberal ini, yaitu pro-kebebasan individual dan anti-negara, merupakan fondasi penting liberalisme. Kaum liberal memandang

laten antara negara dan pasar merupakan konflik antara penindasan dan kebebasan, kekuasaan dan hak individu, dogma otokratik dan logika rasional. Seperti yang dikatakan oleh Adam Smith dalam bukunya 'The Wealth of Nations'.<sup>11</sup>

Setiap individu selalu berusaha mencari peluang untuk memanfaatkan setiap kapital yang dikendalikannya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Tentu saja yang dipikirkannya adalah keuntungan bagi dirinya sendiri, bukan keuntungan bagi masyarakat. Tetapi ketika mengejar keuntungan pribadi itu, dengan sendirinya, atau lebih tepat, mau tidak mau, ia akan memilih bidang-bidang kegiatan yang paling menguntungkan bagi masyarakatnya.

Pejabat pemerintah, yang berusaha mengatur cara warga masyarakat menanamkan modal mereka agar sesuai dengan kehendak pemerintah, bukan hanya akan membebani diri sendiri dengan perhatian yang tidak perlu, tetapi juga akan mengambil-alih wewenang yang seharusnya (dimiliki oleh rakyat), dan tidak yang lebih berbahaya daripada menaruh wewenang itu di tangan seseorang yang begitu tolol sehingga bermimpi bahwa ia adalah orang yang cocok untuk menjalankan kekuasaan itu.

Dalam kutipan-kutipan pendek itu, Adam Smith di satu sisi sangat menghargai, mengagumi, dan menilai sangat tinggi mekanisme pasar. Smith menyebut dinamika pasar itu sebagai "tangan yang tak-terlihat" ('invisible hand'). Sisi lain dari kecintaan pada pasar ini adalah kebencian pada negara, atau paling tidak pada potensi negara untuk menyalah-gunakan kekuasaan. Dalam gambar yang dibuat Smith, negara itu berbahaya dan tidak bisa dipercaya. Smith menyukai kehidupan yang didasarkan pada pasar bebas; suatu dunia "laissez-faire" yang mengutamakan inisiatif individual, pemilikan swasta, dan campur tangan pemerintah yang terbatas.

Yang dilawan oleh Adam Smith di tahun 1776 adalah negara merkantilis abad 18, yaitu suatu negara kuat yang berkeyakinan bahwa kepentingan nasional hanya bisa dicapai kalau kekuatan negara dipakai untuk menciptakan kekayaan, yang akan menghasilkan kekuatan lebih besar lagi. Menurut Adam Smith, alternatif paling baik terhadap kekuasaan negara yang semena-mena adalah kebebasan individu yang aktif dalam pasar. Saat ini, banyak negara yang menerapkan anjuran Bapak liberalisme itu; yaitu mengganti sistem ekonomi politik merkantilis yang restriktif dengan rezim baru yang lebih menekankan peran mekanisme pasar dan mengurangi peran negara dalam mengendalikan proses ekonomi. Bahkan Cina dan Vietnam, dua negara Sosialis, juga menggunakan mekanisme pasar untuk menyuntikkan semangat inisiatif individual ke dalam ekonomi politiknya. Hampir semua negara maju menerapkan prinsip prinsip pemikiran Adam Smith tersebut. Namun bagi sebuah negara yang belum maju (kekurangan devisa atau modal) dalam melakukan pembangunan maka negara tersebut dapat meminjam atau berhutang kepada negara lain. kebanyakan negara negara yang tidak mempunyai modal tersebut adalah negara negara sedang berkembang. Persoalan pembangunan merupakan persoalan menambahkan investasi modal. Hal ini juga senada dengan pemikiran Bloomstrome dan Hatne<sup>12</sup> :

Melihat perbedaan yang tampak antara negara negara industri dan negara negara yang sedang berkembang, dibuatlah usaha-usaha untuk menggambarkan tingkat dan macam macam aspek dari keterbelakangan. Persoalan keterbelakangan kemudian dirumuskan sebagai masalah kekurangan, yakni kekurangan modal.



Menteri Margaret Thatcher dari Inggris dan Presiden Ronald Reagan dari Amerika Serikat.

*IMF, WB* merupakan dua lembaga yang paling mendominasi untuk saat ini. Sebuah negara yang pernah berhubungan dengan kedua lembaga ini harus tunduk pada aturan yang di buat oleh lembaga tersebut. Negara-negara di Amerika Latin Afrika, dan Asia adalah contoh yang paling nyata. Ketika negara-negara tersebut mengalami krisis keuangan atau kesulitan dana segar untuk membangun maka kedua lembaga ini pun akan hadir sebagai "*dewa penyelamat*". Tentunya bantuan yang di berikan lewat beberapa kesepakatan yang harus di terima, di patuhi oleh negara peminjam, jika tidak maka pinjaman tidak akan turun. Pernyataan inilah kemudian yang di sebut sebagai *Struktural Adjustment Program*, yaitu program Penyesuaian Struktural, untuk lebih rigidnya lagi dituangkan dalam bentuk *LoI*.

Adapun isi program penyesuaian struktural ini secara umum adalah turunan dari *Washington Consensus*. misalnya mengenai liberalisasi pasar, Efisiensi, yaitu pencabutan subsidi, pengurangan dana sosial lainnya, dan *ketiga* adalah paket deregulasi yang meliputi pemotongan peraturan yang mengikat kelangsungan investasi dan pasar bebas. Resep ini bisa dikatakan merupakan harga mati dan pernah dipraktekkan di semua negara yang berhubungan dengan kedua lembaga ini.

Neo-Liberalisme yang dijalankan di negara negara sedang berkembang seperti Indonesia tentu saja akan mempunyai dampak yang sangat signifikan baik positif maupun negatif. Walaupun sistem ekonomi politik ini berk

negara negara industri maju keluar dari stagflasi<sup>13</sup> pada akhir tahun 70-an. Pemerintah di negara negara sedang berkembang dianggap melakukan intervensi terhadap pasar dan terlalu banyak pemborosan di sektor publik, misalnya subsidi. Negara negara industri maju juga menganggap bahwa sistem ekonomi politik Neo-Liberal tersebut mampu membawa negara negara sedang berkembang keluar dari krisis dan mampu berkembang ke arah kemajuan dan industrialisasi.

### **Konsep Struktural Power**

Susan Strange dalam bukunya *State and Market* memaknai Kekuasaan struktural (Structural Power) sebagai kemampuan untuk membentuk dan menentukan struktur (misalnya, struktur ekonomi-politik) yang melingkupi dan yang merupakan tempat beroperasinya para aktor (misalnya, individu, kelompok kepentingan, perusahaan).<sup>14</sup> "Kekuasaan Struktural", yang didefinisikannya sebagai "kekuasaan membentuk dan menentukan struktur ekonomi politik global tempat beroperasinya negara-negara lain, lembaga-lembaga politik mereka, dan perusahaan-perusahaan mereka dan ilmuwan-ilmuwan dan para profesional mereka". *Struktur* yang dimaksud itu adalah *lembaga-lembaga, pengaturan-pengaturan, dan "aturan main" yang mengatur perilaku negara dan pasar dalam ekonomi politik internasional*, yang secara bersama-sama melakukan proses produksi, pertukaran, dan distribusi kekayaan dan kekuasaan.

Aktor aktor Yang menjadi pendukung Neo-Liberalisme mempunyai kepentingan terhadap negara negara sedang berkembang. Mereka mampu mengontrol dan mengarahkan negara negara sedang berkembang untuk

<sup>13</sup> Stagnasi ekonomi dibarengi dengan inflasi yang tinggi. Para ekonom Neo-Liberal menyoalakan stagflasi tersebut diakibatkan oleh pengeluaran untuk sektor publik oleh pemerin

menjalankan program program Neo-Liberalisme yang sebenarnya malah merugikan negara berkembang itu sendiri. Yang paling dominan aktor aktor tersebut mampu melakukan kontrol atas struktur finansial negara negara sedang berkembang. Selain struktural Power, Neo-Liberalisme juga mempunyai *Future Power*, (kekuatan untuk menentukan masa depan). Tentu saja hal ini ditujukan pada negara-negara sedang berkembang. Neo- Liberalisme mampu menentukan masa depan sebuah negara (menghancurkan maupun membangun)

- Wujud dari kekuasaan struktural adalah kemampuan:
  1. menentukan agenda pembicaraan;
  2. menentukan aturan main dan kebiasaan yang mengatur hubungan antar-aktor;
  3. menentukan cara bagaimana sesuatu mesti dilakukan;
  4. membentuk kerangka kerja yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat atau pemerintah dengan bisnis.
  
- Dengan demikian, hasil dari suatu proses politik bukan hanya ditentukan oleh partisipasi aktif pembuatan kebijakan (yaitu, dalam menerapkan kekuasaan-langsung); tetapi juga oleh 'non-decision' atau ketidaksediaan untuk membuat keputusan (misalnya, kekuasaan untuk tidak memasukkan suatu isu ke dalam agenda pembicaraan, atau kekuasaan untuk menjamin bahwa kalau toh isu itu ditimbulkan tidak akan ada tindakan efektif yang akan dilakukan mengatasinya)

**Tabel I.1**  
**EMPAT SUMBER KEKUASAAN STRUKTURAL**

<p><b>1. Kendali atas jaminan keamanan.</b></p>	<p>Barang siapa bisa memberi perlindungan pada orang lain dari ancaman konflik kekerasan akan mampu menerapkan kekuasaan di bidang-bidang lain di luar urusan keamanan (misalnya, distribusi makanan atau administrasi keadilan).</p>
<p><b>2. Kendali atas produksi.</b></p>	<p>Kekuasaan untuk menentukan apa yang akan diproduksi, oleh siapa, dengan sarana apa, dengan kombinasi faktor produksi apa (tanah, tenaga kerja, kapital dan teknologi), dan bagaimana pemberian ganjaran bagi masing-masing aktor dilakukan. Kekuasaan struktural atas produksi ini merupakan landasan bagi perubahan sosial dan politik.</p>
<p><b>3. Kendali atas keuangan.</b></p>	<p>Yang diinvestasikan dalam ekonomi yang maju bukanlah uang, tetapi kredit; dan kredit bisa diciptakan. Aktor yang mampu meyakinkan pihak lain bahwa ia memiliki kemampuan menciptakan kredit akan mampu mengendalikan ekonomi kapitalis.</p>
<p><b>4. Kendali atas pengetahuan, keyakinan dan gagasan.</b></p>	<p>Aktor yang mampu mengembangkan atau memperoleh pengetahuan dan mencegah pihak lain agar tidak bisa memperoleh jenis pengetahuan yang dinilai tinggi dan diperlukan; dan aktor yang bisa mengendalikan saluran komunikasi pengetahuan akan memiliki kekuasaan struktural yang besar</p>

**Tabel I.2**  
**EMPAT STRUKTUR KEKUASAAN.**

<b>1. Struktur keamanan</b>	Kerangka kekuasaan yang terbentuk akibat kemampuan memberi jaminan keamanan kepada orang atau kelompok orang lain. Struktur jaminan keamanan menentukan 'siapa-memperoleh-apa' dalam ekonomi. Siapa menjamin keamanan siapa? Jaminan terhadap ancaman atau dugaan ancaman apa? Berapa harga atau apa syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh jaminan itu? Kepada siapa individu, kelompok sosial atau negara mengandalkan jaminan keamanan itu? Seberapa besar jaminan yang diberikan? Dengan syarat apa?
<b>2. Struktur produksi.</b>	Sejumlah pengaturan yang menentukan apa yang diproduksi, oleh siapa dan untuk siapa, dengan cara apa, dan dengan syarat apa. Siapa mengendalikan proses penciptaan kekayaan?
<b>3. Struktur finansial.</b>	Sejumlah pengaturan yang menentukan ketersediaan kredit dan semua faktor yang menentukan nilai tukar berbagai mata uang. Kekuasaan untuk menciptakan kredit sama dengan kekuasaan untuk membolehkan atau mencegah pihak lain memperoleh kemungkinan untuk melakukan belanja sekarang dan pembayaran besok; kekuasaan untuk memberi kesempatan pihak lain untuk menerapkan daya beli dan dengan demikian mempengaruhi pasar barang produksi; dan kekuasaan untuk mengatur atau mengacaukan mata uang yang menjadi denominasi kredit, dan dengan demikian mempengaruhi nilai-tukar antar mata uang.
<b>4. Struktur pengetahuan.</b>	Struktur pengetahuan menentukan pengetahuan apa yang akan dicari, bagaimana menyimpannya, dan bagaimana pengetahuan dikomunikasikan dengan cara apa kepada siapa dan dengan syarat apa. Siapa yang mengendalikan penciptaan pengetahuan?

Sumber: Susan Strange, *Markets and States*

Negara – negara industri maju menggunakan IMF sebagai alat hegemoni dan dominasi terhadap negara – negara sedang berkembang. melalui IMF negara–negara sedang industri maju tersebut dapat melakukan kontrol atas sumber – sumber kekuasaan. Dan seringkali negara – negara sedang berkembang tidak mempunyai independensi dan otonomi atas sumber – sumber kekuasaannya, karena sumber – sumber kekuasaan tersebut telah dikontrol oleh negara–negara industri maju melalui IMF. Misalnya jika sebuah negara dari

berkembang ingin melakukan sesuatu atau mengeluarkan sebuah kebijakan, harus meminta saran dan mendapatkan persetujuan dari negara donor atau IMF. Jika negara donor atau IMF tidak menyetujui kebijakan tersebut tidak maka kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan.

Dalam hal ini lembaga lembaga keuangan internasional dan negara negara donor mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk menentukan agenda agenda pembicaraan dan mendominasi isi pembicaraan dalam setiap negosiasi dan kesepakatan kesepakatan yang dilakukan antara kreditor dan debitor, selain itu mereka juga dapat menentukan aturan main dan mengarahkan hubungan dengan kreditor. Secara implisit lembaga lembaga keuangan internasional dan negara donor mempunyai kemampuan untuk mengendalikan keempat struktur kekuasaan, yaitu struktur keamanan, struktur produksi, struktur finansial dan struktur pengetahuan. Dalam kasus hutang luar negeri, lembaga lembaga keuangan internasional dan negara negara donor mengarahkan struktur finansial negara sedang berkembang ke arah liberalisme, seperti yang tertuang dalam *struktural adjustment program* diantaranya menghapuskan hambatan terhadap investasi asing dalam bidang industri dan jasa finansial. Tujuannya adalah menciptakan kompetisi sehingga proses produksi barang dan pelayanan jasa lokal terdorong untuk menjadi lebih efisien dan juga devaluasi mata uang lokal terhadap dolar AS agar barangnya menjadi lebih kompetitif

### **E. Hipotesa**

Hutang Luar Negeri dan program penyesuaian struktural yang diberikan IMF merupakan instrumen yang membawa transformasi Indonesia menuju ekonomi Neo-Liberal.

### **F. Jangkauan Penelitian**

Dalam membahas masalah tersebut, dan untuk menjaga kedisiplinan penulis terhadap masalah yang diangkat, penulis membatasi jangkauan penelitian ini pada kurun waktu pertengahan tahun 1997 ketika terjadi krisis moneter di negara Indonesia hingga saat ini.

### **G. Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deduksi, yaitu teori yang digunakan sebagai dasar analisa untuk kemudian di peroleh sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Sedangkan pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisis hanya sampai pada tarap deskripsi dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. Penekanannya pada usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>15</sup>

Sedangkan metodologi pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data pustaka, data pustaka diperlukan untuk menggali dasar dasar teoritik dan pembedahan awal permasalahan yang diteliti. Tidak menutup kemungkinan ditemukan literatur berkenaan dengan obyek penelitian seperti buku- buku, makalah, jurnal, "website" internet atau sumber bacaan lainnya.

## **H. Sistematika penulisan**

Dalam mempermudah upaya penulisan maka sistematika penulisan ini akan dituliskan dalam kerangka per-bab. Maka, sistematika pembahasan dalam rencana penelitian ini adalah:

BAB I. Keseluruhan dari bab ini akan bernama pendahuluan, didalamnya pokok-pokok utama pembahasannya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori yang dipakai, metode penulisan yang di terapkan dan tujuan penelitian.

### **BAB II Struktur Ekonomi Politik Indonesia Sebelum Krisis Moneter**

- A. Pembangunanisme Sebagai Ideologi**
- B. Hutang Luar Negeri dan Investasi Asing Sebagai Modal Utama Pembangunan Indonesia**

### **BAB III. Pembangunan yang berbuah Krisis**

- A. Rapuhnya Sektor Finansial**
- B. Ketergantungan Hutang Luar Negeri**
- C. Implikasi Politik Masuknya IMF**

### **BAB IV. Transformasi Menuju Neo-Liberalisme**

- A. Pengantar**
- B. Konsep dan Gagasan Neo Liberalisme**
- C. SAP Dan Penerapan Program Neo-Liberalisme**
- D. Neo Liberalisme dan Pembangunan Demokrasi Ekonomi**